



# Dorong Profesionalitas Pengawas Internal Pemerintah

**PONTIANAK, TRIBUN** - Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya bersama seluruh Wakil Gubernur se-Indonesia menghadiri rapat kerja (Raker) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda) di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (26/9).

Christiandy menilai, Raker ini memberikan masukan bagi setiap daerah dalam melakukan pengawasan terkait kebijakan yang akan dilakukan khususnya dalam mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki integritas, profesionalisme, serta kapabilitas, APIP memiliki peranan yang sangat vital.

"Khususnya dalam melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah melalui kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Suatu sistem dapat berjalan dengan baik, apabila ada komitmen yang kuat dari setiap pimpinan terkait," ungkapnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo, yang membukan Raker mengingatkan kepala daerah untuk meningkatkan peran APIP secara optimal.

"Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan Pemda, untuk mengoptimalkan peran APIP yakni, membentuk APIP yang memiliki integritas, profesionalisme, serta kapabilitas," ucapnya.

Tjahjo Kumolo menyatakan, ada permasalahan serius yang terjadi di daerah saat ini, adalah rendahnya integritas dalam penyelenggaraan pemda. "Kita sarankan, agar APIP bersifat independen serta adanya pemenuhan jumlah personil APIP," jelasnya.

Hal yang paling terpenting menurut Mendagri, adalah pengawasan terhadap anggaran dan juga memperkuat orientasi pengawasan APIP.

"Masalah terpenting adalah adanya pengawasan

terhadap anggaran, masalah keuangan, karenanya APIP harus mendekatkan hasil pengawasannya kepada isu-isu terkini dan mendeteksi potensi terjadinya korupsi sejak dini," katanya.

Ia juga mengajak, seluruh pemerintah daerah saling bekerja sama, mengelola daerah baik dari segi konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah maupun kepatuhan dari masing-masing daerah.

Anggota DPRD Kalbar Kadri menyatakan, rapat kerja yang diikuti Wagub merupakan supaya pemerintah daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

"Jadi peran APIP harus secara optimal. Tentunya dengan memiliki profesionalisme dan integritas sebagai APIP itu sendiri. Sehingga semua yang dikerjakan bisa berjalan dengan baik untuk membangun daerahnya masing-masing," ujarnya kepada *Tribun*.

Politisi PKB ini sependapat dengan Mendagri bahwa saat ini integritas sebagai penyelenggara Pemda masih rendah. "Maka dari itu penyelenggara pemerintah daerah harus bekerja dengan independen," jelasnya.

Apalagi, kata Kadri, pemerintah pusat sedang melakukan efisiensi anggaran keseluruhan pemerintah daerah mengingat kondisi keuangan negara belum stabil. "Sangat perlu ada pengawasan terhadap anggaran, dengan memperkuat peran APIP itu sendiri," ucapnya.

Menurutnya, sudah berapa banyak penyelenggara pemerintah daerah terlibat dalam tindakan korupsi. Karena tidak optimal dalam melakukan pengawasan terkait anggaran tersebut. "Kalau kita sudah melakukan kerja sesuai SOP maka korupsi tidak akan terjadi," ungkapnya. **(\*rul)**